

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan keuangan Daerah diatur oleh ketentuan pemerintahan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 terkait pengelolaan keuangan Daerah. Manajemen ini mencakup serangkaian kegiatan yang komprehensif termasuk perencanaan, penganggaran, implementasi, akuntansi, pelaporan, akuntabilitas, serta pengawasan keuangan daerah. ialah penting bahwasanya manajemen keuangan regional mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan. Menurut ketentuan Menteri pada Negeri Nomor 13 Tahun 2006, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah meliputi manajemen yang tertib, kepatuhan bagi ketentuan perundang-undangan, efektivitas serta efisiensi, ekonomi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kesopanan, serta manfaat bagi masyarakat.

Proses manajemen keuangan daerah dimulai dengan perencanaan serta penganggaran, yang mencerminkan efektivitas manajemen ekonomi regional yang sehat pada memfasilitasi desentralisasi kebijakan fiskal yang sukses. Inisiatif perencanaan dimulai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD berfungsi selaku dokumen perencanaan Pembangunan daerah 20 tahun yang bertindak selaku pedoman pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna setiap periode 5 tahun. Setelah RPJMD selesai, pemerintahan daerah membuat rencana kerja pemerintahan daerah (RKPD) yang menguraikan RPJMD guna jangka waktu 1 tahun, sesuai dengan pekerjaan pemerintah. Berdasarkan RKPD, kepala daerah menyiapkan rancangan kebijakan umum guna Anggaran. Rancangan kebijakan umum bagi APBD ini

kemudian dibahas secara kolaboratif oleh para pemimpin daerah bersama DPRD, akhirnya mencapai kesepakatan guna menetapkannya selaku kebijakan umum APBD (KUA). Setelah pengesahan kebijakan umum ini, pemerintahan daerah serta DPRD terlibat pada diskusi mengenai proyek-proyek prioritas serta batas anggaran sementara (PPAS) yang diusulkan oleh kepala daerah. Kepala daerah selanjutnya mengeluarkan arahan guna perumusan rencana kerja serta anggaran (RKA) guna SKPD, berfungsi selaku pedoman bagi kepala SKPD guna mengembangkan RKA-SKPD sesuai dengan Nota Kesepahaman. Setelah RKA-SKPD selesai, langkah selanjutnya melibatkan pembuatan rencana pengelolaan daerah sehubungan dengan anggaran serta penyusunan ketentuan daerah terkait pengembangan anggaran. ketentuan daerah yang direncanakan nantinya menjalani evaluasi oleh kepala daerah sebelum dikonfirmasi selaku ketentuan daerah yang berkaitan dengan anggaran serta aturan dasar yang terkait dengan pengembangan anggaran.

Pelaksanaan pelaksanaan anggaran meliputi tindakan ataupun upaya guna melaksanakan semua rencana serta kebijakan yang dirumuskan serta ditetapkan (BPKP, 2011). tahapan ini dimulai ketika Kepala pengelolaan keuangan Daerah (PPKD) menginformasikan bagi seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna mempresentasikan rancangan rencana pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD) pada waktu 3 hari kerja setelah persetujuan anggaran. Rancangan DPA-SKPD mencakup rincian yang komprehensif mengenai tujuan yang nantinya dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang diharapkan guna mencapai tujuan tersebut, serta rencana penarikan guna setiap pekerjaan unit publik, beserta proyeksi pendapatan. Selanjutnya, Kepala SKPD menyerahkan draft DPA-SKPD yang sudah mereka persiapkan bagi PPKD. Tim anggaran pemerintahan daerah

bekerja sama dengan SKPD bertanggung jawab guna memverifikasi rancangan DPA-SKPD. DPA-SKPD yang disetujui harus diserahkan bagi Kepala SKPD masing-masing, pimpinan satgas pengawasan daerah, serta CPC pada waktu 7 hari kerja sejak tanggal persetujuan. Pelaksanaan anggaran meliputi pengelolaan pendapatan, pengeluaran, serta anggaran keuangan. Setelah semester pertama, pemerintahan daerah menyiapkan pelaporan yang merinci hasil paruh pertama anggaran serta prediksi guna 6 bulan berikutnya. pelaporan ini disampaikan bagi DPR selambat-lambatnya akhir Juli tahun anggaran yang relevan guna diskusi kolaboratif antara DPRD serta pemerintahan daerah. Penyesuaian anggaran pada menanggapi perkembangan dan/atau perubahan keadaan dimusyahkan dengan DPRD serta pemerintahan daerah selaku bagian dari tahapan penyusunan perkiraan pengembangan anggaran guna tahun fiskal yang bersangkutan.

Akuntansi ialah komponen penting dari tahapan manajemen keuangan. Setelah implementasinya, akuntansi melibatkan pencatatan yang cermat dari semua kegiatan yang berkaitan dengan manajemen administrasi serta perbendaharaan yang berkontribusi pada fluktuasi kekayaan daerah, baik dari segi aset maupun sumber daya moneter. Ini juga mencakup pelaksanaan tugas-tugas sementara pada konteks manajemen keuangan regional sebab berkaitan dengan pelaksanaan anggaran guna satu tahun fiskal. Di ranah manajemen, Bendahara Pendapatan serta Bendahara Pengeluaran memainkan peran penting pada memenuhi fungsi perbendaharaan pada unit kerja daerah (SKPD). Bendahara Pendapatan SKPD bertanggung jawab guna mengawasi penghitungan seluruh pendapatan serta simpanan pendapatan pada lingkup mereka, menyerahkan pelaporan akuntansi pendapatan bagi Direktur Manajemen keuangan Daerah (PPKD), serta melakukan verifikasi, evaluasi, serta analisis pelaporan tersebut.

Sementara itu, Bendahara bertugas mengelola inventaris kas, yang meliputi menerima, menjaga, mengelola, serta mencatat transaksi moneter pada administrasi mereka, melakukan audit, serta melaksanakan pembayaran sesuai dengan arahan dari komite manajemen (KDP). Mereka juga berkewajiban guna menolak perintah pembayaran yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan serta guna melakukan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh ketentuan kepala daerah. pelaporan yang merinci pendapatan, aset, pengeluaran, serta tugas daerah disiapkan berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan daerah. pemerintahan daerah sudah mengembangkan sistem akuntansi yang selaras dengan standar akuntansi pemerintah. Kerangka akuntansi inilah yang pada akhirnya menghasilkan pelaporan keuangan regional.

Pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan merupakan kegiatan yang dijalankan selaku wujud pelaksanaan tanggung jawab serta wewenang yang diberikan guna mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang dijalankan pada jangka waktu tertentu. Rencana pengelolaan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi pelaporan keuangan pemerintahan daerah yang disusun serta disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan, yang kemudian disetujui oleh kepala daerah, disetujui oleh DPRD, setelah 3 hari dijalankan penilaian oleh Gubernur pada jangka waktu 3 hari. 15 hari kerja serta setelah melakukan penilaian, pemerintahan daerah wajib melakukan penyesuaian pada waktu 7 hari setelah penyesuaian, diumumkan peraturan daerah terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pengawasan ialah kegiatan ataupun tahapan pemantauan capaian pemerintahan daerah bagi segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak

serta tugas daerah guna memastikan bahwasanya rencana sudah disusun serta dilaksanakan pada saat ini. pelaporan keuangan diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan serta DPRD serta Badan Pengawasan keuangan pemerintahan (BPKP), yang memantau ketentuan daerah terkait tanggung jawab pelaksanaan APBD..

Dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, pemerintahan daerah bisa memenuhi tujuan Pembangunan serta masyarakat. Tata kelola keuangan daerah yang transparan serta akuntabel, bersama dengan promosi kebijakan keuangan yang sehat, bisa menghasilkan keuntungan abadi bagi otoritas lokal serta komunitas mereka. Seperti yang dikemukakan Kepala Badan keuangan serta Aset Daerah Kota Kupang, pengelolaan keuangan daerah berdampak signifikan bagi capaian keuangan daerah sebab hasil keuangan daerah. pada konteks ini, efektivitas program serta inisiatif pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh pengelolaan keuangan daerah yang komprehensif, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, akuntabilitas, serta pengawasan keuangan. Penelitian yang dijalankan oleh Putra et al. (2016) sudah meneliti dampak pengelolaan keuangan daerah bagi capaian keuangan pemerintahan daerah, mengungkapkan bahwasanya manajemen keuangan daerah yang efektif secara positif serta signifikan mempengaruhi capaian keuangan pemerintahan daerah. Namun, sebuah studi oleh Husen Ahmad et al. (2017) menyatakan bahwasanya manajemen keuangan memiliki efek positif yang tidak signifikan bagi capaian keuangan.

Kinerja keuangan regional mengacu pada tingkat pencapaian pada operasi keuangan regional, yang mencakup pendapatan serta pengeluaran, sebagaimana dinilai melalui indikator keuangan yang ditetapkan oleh kebijakan

atupun pedoman legislatif guna tahun anggaran tertentu. pada mengevaluasi capaian keuangan daerah, pemerintahan daerah memakai beberapa rasio, antara lain Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi keuangan Regional, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kepatuhan, serta Rasio Kemandirian keuangan Daerah.

Menilai capaian keuangan pemerintahan daerah terkait erat dengan akuntabilitas serta transparansi (Lucy, 2013). Manajemen capaian yang efektif sangat penting guna meningkatkan mekanisme akuntabilitas. Penerapan akuntabilitas serta transparansi pada pengelolaan keuangan daerah diharapkan bisa meningkatkan capaian daerah.

Akuntabilitas mengacu pada tugas guna memberikan tanggapan ataupun penjelasan mengenai capaian tindakan yang diambil oleh individu ataupun organisasi bagi pihak yang memiliki hak ataupun wewenang guna meminta informasi tersebut. Akuntabilitas instansi pemerintahan (AKIP) merupakan komitmen entitas pemerintahan guna melaporkan keberhasilan ataupun kegagalan misinya pada memenuhi tujuan serta sasaran yang sudah ditetapkan melalui tahapan akuntabilitas rutin (BPKP, 2011). Akuntabilitas yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dimulai dengan perencanaan anggaran, berlanjut melalui pelaksanaan anggaran, serta berpuncak pada pelaporan anggaran yang komprehensif. Dengan memastikan bahwasanya tahapan perencanaan serta implementasi anggaran lebih partisipatif, bersama dengan mekanisme pengawasan internal serta eksternal yang kuat, risiko Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme bisa dikurangi.

Akuntabilitas mencakup lebih dari sekedar aspek keuangan; itu juga melibatkan akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, serta akuntabilitas hasil. Selain itu, akuntabilitas tidak hanya berfokus pada

proses, kinerja, serta manajemen; itu juga berkaitan dengan manajemen keuangan serta kualitas hasil. Salah satu metode guna menyatakan akuntabilitas pada manajemen keuangan negara ialah melalui pelaporan keuangan pemerintah. pelaporan keuangan tahunan secara konsisten diserahkan bagi CPC tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan yang relevan. Namun, mengenai akses informasi bagi masyarakat, sudah diamati bahwasanya masyarakat masih belum bisa menghadiri sidang Parlemen guna terlibat pada diskusi terkait pelaporan akuntabilitas serta temuan CPC. Seperti dicatat oleh Kepala Badan keuangan serta Aset Daerah Kota Kupang, akuntabilitas memiliki dampak yang signifikan bagi capaian ekonomi daerah, sebab capaian keuangan yang efektif bergantung pada organisasi serta akuntansi keuangan yang tepat sesuai dengan standar akuntansi keuangan daerah.

Penelitian yang dijalankan oleh Novatiani et al. (2019), Umar et al. (2018), Riswanto (2016), serta Auditya et al. (2013) menyatakan bahwasanya akuntabilitas berdampak positif serta signifikan bagi capaian lembaga pemerintah. Sebaliknya, sebuah studi oleh Rina Nurarifah dkk. (2022) mengungkapkan bahwasanya meskipun akuntabilitas memang memiliki efek positif, hal itu tidak secara signifikan mempengaruhi capaian keuangan pemerintahan daerah. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwasanya tanpa transparansi, akuntabilitas tidak bisa ada; sebaliknya, tanpa akuntabilitas, transparansi kehilangan signifikansinya, serta transparansi sangat penting guna implementasi akuntabilitas yang efektif. Meskipun akuntabilitas serta transparansi secara fundamental saling berhubungan, mereka beroperasi secara paralel.

Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintahan pada mengelola keuangan dengan menyediakan informasi bagi mereka yang membutuhkannya (Hehanussa, 2015). Merupakan tanggung jawab pemerintahan guna memberikan informasi relevan yang akurat serta jelas bagi pihak-pihak yang sesuai sesuai dengan ketentuan yang ada. Kristianten (2006:73) mengidentifikasi beberapa indikator transparansi, termasuk ketersediaan serta aksesibilitas dokumen, kejelasan serta kelengkapan informasi, serta keterbukaan tahapan serta kerangka hukum yang menjamin transparansi. Manajemen capaian yang efektif meletakkan dasar bagi transparansi. Sangat penting guna mencapai keseimbangan antara transparansi serta kebutuhan nantinya keamanan organisasi serta informasi, yang bisa berdampak pada privasi individu. pemerintahan daerah harus menetapkan pedoman yang jelas terkait metode pengumpulan informasi (Krina, 2003).

Transparansi keuangan memainkan peran penting pada meningkatkan capaian pemerintahan daerah, menyatakan bahwasanya peningkatan keterbukaan pada keuangan daerah serta pelaporan keuangan mengarah pada peningkatan keseluruhan pada kemandirian pemerintahan daerah. Metode yang layak guna meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pelaporan keuangan ialah dengan mengubah format pelaporan tersebut dilakukan. pemerintahan Daerah Kota Kupang menonjol selaku salah satu daerah otonom yang berkomitmen guna menjunjung tinggi prinsip transparansi pada pengelolaan keuangan, mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi serta Petunjuk yang dikeluarkan oleh Menteri pada Negeri No. 188.52/1793/3J, yang menekankan pentingnya peningkatan transparansi manajemen keuangan di daerah. Pengamatan yang dijalankan oleh Doroste dkk. (2022) mengungkapkan bahwasanya hanya lima lembaga yang memiliki situs web, diantaranya Dinas

Kesehatan, Kantor Koperasi serta UMKM, Dinas Pendidikan serta Kebudayaan, BAPPEDA, serta pemerintahan Kota Kupang. Namun, dari lima entitas ini, hanya situs web pemerintahan Kota Kupang yang secara konsisten menyediakan informasi yang bisa diakses berkaitan dengan pengelolaan Anggaran, khususnya data dari 2015 hingga 2020, yang tersedia guna diunduh. Selain itu, situs web berisi informasi yang mudah diakses mengenai kondisi kawasan Kota Kupang. Selanjutnya, pemerintahan sudah membentuk platform di situs web guna pengaduan publik, yang bertujuan guna meningkatkan capaian EMKOT. Sebaliknya, lembaga lain biasanya tidak memberikan informasi yang diperlukan bagi publik secara teratur; sebaliknya, mereka menawarkan data ringkasan mengenai tujuan, misi, program kerja, serta tugas mereka. Beberapa lembaga memiliki situs web yang tidak bisa diakses, seperti BAPPEDA Kota Kupang. Meskipun demikian, pemerintahan Daerah Kota Kupang menyatakan tingkat kerahasiaan yang signifikan mengenai pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana dibuktikan oleh tingkat transparansi yang relatif rendah. pemerintahan Daerah Kota Kupang gagal mempublikasikan dokumen terkait anggaran di situs Direktorat keuangan Daerah Kementerian pada Negeri Republik Indonesia. Kepala Badan keuangan serta Aset Daerah menyatakan bahwasanya transparansi di Kota Kupang sangat penting guna meningkatkan capaian keuangan pemerintahan serta memastikan keterbukaan informasi bagi pemangku kepentingan serta masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan capaian keuangan pemerintahan daerah.

Penelitian yang dijalankan oleh Novatiani et al. (2019), Umar et al. (2018), Riswanto (2016), serta Auditya et al. (2013) menyatakan bahwasanya transparansi serta akuntabilitas secara positif serta signifikan mempengaruhi

capaian lembaga pemerintah, baik dinilai secara individu maupun kolektif. Sebaliknya, temuan yang berbeda dilaporkan oleh Putra et al. (2016) serta Nasution (2018), di mana transparansi ditemukan memiliki dampak negatif yang signifikan bagi capaian pemerintahan daerah, serta penelitian yang dijalankan oleh Rina Nurarifah dkk. (2022) mengungkapkan bahwasanya transparansi memberikan efek positif minimal pada capaian keuangan pemerintahan daerah. Studi-studi ini meneliti hubungan antara transparansi serta capaian keuangan pemerintahan daerah menyoroiti adanya hasil yang tidak konsisten.

Perbedaan yang diamati pada temuan studi sebelumnya memotivasi peneliti guna mereplikasi penyelidikan sambil memasukkan variabel tambahan yang diyakini secara khusus mempengaruhi anggaran organisasi, yang bisa mempengaruhi interaksi antara manajemen keuangan daerah, akuntabilitas, serta transparansi pada sumber daya keuangan pemerintahan daerah. Dengan memilih budaya organisasi selaku variabel moderasi, pentingnya capaian muncul selaku pertimbangan penting pada mengevaluasi seberapa efektif sebuah lembaga ataupun organisasi bisa memenuhi visi serta misinya pada menyediakan layanan publik.

Sutrisno (2010) berpendapat bahwasanya budaya organisasi ialah sebuah sistem nilai, keyakinan, asumsi ataupun norma yang berlaku sejak lama, disepakati serta diikuti oleh anggota organisasi selaku pedoman perilaku serta penyelesaian masalah organisasi. Budaya organisasi ialah kerangka yang memandu perilaku sehari-hari karyawan serta pengambilan keputusan serta mengarahkan tindakan mereka guna mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi yang diterapkan di pemerintahan Kota Kupang salah satunya disiplin pegawai pada bekerja. Misalnya yang peneliti lihat di kantor, banyak pegawai ataupun staf yang hanya

datang guna absen pagi setelah itu langsung pulang serta datang kembali setelah absen pulang. Hal ini tidak mencerminkan disiplin pegawai pada bekerja, sehingga bisa membuat organisasi ataupun bagian tersebut tidak efisien serta efektif pada mewujudkan visi serta misi dari organisasi tersebut. serta disisi lain menurut Kepala Badan keuangan serta Aset Daerah Kota Kupang budaya organisasi sudah relative cukup baik yaitu dengan adanya pembagian tugas serta wewenang, kerjasama serta kolaborasi pada menyukseskan program serta kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Penelitian dengan memakai budaya organisasi selaku variabel moderasi dijalankan oleh Permadi (2018), Rusmita serta Badera (2018), Sucitrawati serta Sari (2017) serta Novatama (2019) yang keempatnya memperoleh hasil bahwasanya budaya organisasi selaku variabel moderasi sudah memoderasi variabel independen bagi variabel dependen. Namun berbeda dengan penelitian yang dijalankan oleh Rina Nurarifah dkk (2022) yang menemukan bahwasanya budaya organisasi mempunyai dampak positif yang kecil bagi capaian keuangan pemerintahan daerah. Penelitian yang sama juga dijalankan oleh Sujanadi pada tahun 2021 dengan judul dampak pengelolaan keuangan Daerah, Akuntabilitas, tranparasi serta Budaya Organisasi selaku Variabel Moderasi bagi capaian keuangan pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju dengan temuan penelitian budaya organisasi memperkuat dampak pengelolaan keuangan, akuntabilitas serta tranparasi capaian keuangan pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti nantinya melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas dan tranparasi Terhadap capaian Keuangan pemerintahan Daerah Kota Kupang dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi”**.

### **1.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil ialah selaku berikut :

1. Bagaimana pengelolaan keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi, Budaya Organisasi serta capaian keuangan pemerintahan Daerah di Kota Kupang?
2. Apakah pengelolaan keuangan Daerah berdampak positif serta signifikan bagi capaian keuangan pemerintahan Daerah Kota Kupang?
3. Apakah Akuntabilitas berdampak positif serta signifikan bagi capaian keuangan pemerintahan Daerah Kota Kupang?
4. Apakah tranparasi berdampak positif serta signifikan bagi capaian keuangan pemerintahan Daerah Kota Kupang?
5. Apakah Budaya Organisasi bisa memoderasi dampak Pengelolaan Keuangan pemerintahan Daerah bagi capaian keuangan pemerintahan daerah Kota Kupang?
6. Apakah Budaya Organisasi bisa memoderasi dampak Akuntabilitas bagi capaian keuangan pemerintahan Daerah Kota Kupang?
7. Apakah Budaya Organisasi bisa memoderasi dampak tranparasi bagi capaian keuangan pemerintahan Daerah Kota Kupang?

### **1.2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui :

1. Mengetahui pengelolaan keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi, Budaya Organisasi serta capaian keuangan pemerintahan Daerah di Kota Kupang?

2. Pengaruh positif serta signifikan pengelolaan keuangan pemerintahan Daerah bagi capaian keuangan pemerintahan Daerah Kota Kupang.
3. Pengaruh positif serta signifikan Akuntabilitas bagi capaian keuangan pemerintahan Daerah Kota Kupang.
4. Pengaruh positif serta signifikan transparansi bagi capaian keuangan pemerintahan Daerah Kota Kupang.
5. Peran Budaya Organisasi pada memoderasi dampak pengelolaan keuangan pemerintahan Daerah bagi capaian keuangan pemerintahan daerah Kota Kupang.
6. Peran Budaya Organisasi pada memoderasi dampak Akuntabilitas terhadap capaian keuangan pemerintahan Daerah Kota Kupang.
7. Peran Budaya Organisasi pada memoderasi dampak transparansi bagi capaian keuangan pemerintahan Daerah Kota Kupang.

### **1.3. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini tentu mempunyai manfaat secara :

- 1) Teoritis yaitu guna mengetahui sejauh mana dampak pengelolaan keuangan Daerah, Akuntabilitas serta Transparansi bagi capaian keuangan pemerintahan Kota Kupang dengan Budaya Organisasi selaku variabel moderasi.
- 2) Praktis :
  - a. Bagi penulis  
Sebagai pengetahuan serta guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang lebih besar pengaruhnya bagi capaian keuangan Daerah.
  - b. Bagi pembaca  
Peneliti berharap penelitian ini bisa menambah pengetahuan para pembaca serta memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang

berperan positif serta penting pada mempengaruhi capaian keuangan daerah..

c. Bagi akademisi

Peneliti berharap penelitian ini bisa memperkaya literatur serta memberikan kontribusi terkait perkembangan teori serta teori yang berkaitan dengan peningkatan capaian keuangan pemerintahan daerah.

d. Bagi pemerintahan / Organisasi Perangkat Daerah

Peneliti berharap kajian ini bisa menjadi rekomendasi bagi seluruh pejabat pengelola keuangan daerah pada “menjaga capaian keuangan pemerintahan Kota Kupang”.